



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LEDYS DJAFAR
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 832496

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 5.370.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/400 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, Rp. 1.200.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/100 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, Rp. 320.000.000 | | |
| 4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000 | | |
| 5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000 | | |
| 6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 380.000.000 |
| 1. MOBIL, XTRAIL MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000 | | |
| 2. MOBIL, WULING MINI BUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 120.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 152.869.734 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 20.000.000 |



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.042.869.734
III. HUTANG	Rp.	592.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.450.869.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.